

Peran Partai Politik Penguasa Dalam Pembuatan Kebijakan Ekonomi Nasional (Studi Kasus Partai PDI Perjuangan 2019 - 2024)

Imam Wahyudin¹, Jafar Shodiq², Nadia Aulia Putri Syntia³

^{1,2,3}Ilmu Politik, FISIP, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.682, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294

imamwahyudin836@gmail.com, zokaaaoyekk@gmail.com, nadiaaulia398@gmail.com

ABSTRAK

Sejarah politik telah menunjukkan bahwa keberlangsungan pemerintahan dan elektabilitas partai pemerintah bergantung pada kebijakan ekonomi yang telah ditentukan oleh pemerintah sendiri. Kebijakan ekonomi pemerintah berkaitan dengan kebijakan politik ekonomi partai yang berkuasa atau partai pemerintah. Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, dengan fokus pada peran politik pemerintah studi kasus partai PDI Perjuangan dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah. PDI Perjuangan, sebagai salah satu partai politik di Indonesia mempunyai peranan yang besar dalam pembuatan kebijakan ekonomi nasional melalui keterlibatan kadernya di berbagai lembaga pemerintah. Keterlibatan tersebut termasuk dalam proses legislasi terkait perekonomian, seperti contoh regulasi investasi, perpajakan dan perlindungan konsumen. Maka dari itu penting bagi partai politik penguasa dalam menyusun visi-misi yang jelas dan dapat dikomunikasikan pada masyarakat dengan bagik sehingga dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi secara keseluruhan.

Kata kunci: Kebijakan ekonomi, Partai politik, Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

ABSTRACT

Political history has shown that the continuity of government and the electability of government parties depend on economic policies that have been determined by the government itself. The government's economic policies are related to the political and economic policies of the ruling party or government parties. In this research, we use a qualitative approach to interpret the phenomena that occur, with a focus on the political role of the government in the case study of the PDI Perjuangan party in influencing government economic policy. PDI Perjuangan, as a political party in Indonesia, has a large role in making national economic policies through the involvement of its cadres in various government institutions. This involvement includes the legislative process related to the economy, for example investment regulations, taxation and consumer protection. Therefore, it is important for the ruling political party to formulate a clear vision and mission that can be communicated to the public well so that it can influence overall economic policy

Keywords: *Economic policy, political party, The Role of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP)*

1. PENDAHULUAN

Pada era demokrasi modern, peran partai politik menjadi elemen krusial dalam membentuk arah kebijakan suatu negara, termasuk dalam konteks ekonomi. Fokus utama dari artikel ini adalah menggali dan menganalisis peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) selama periode 2014-2024, terutama dalam proses pembuatan kebijakan ekonomi nasional Indonesia. PDI Perjuangan, sebagai partai penguasa selama periode tersebut, memiliki dampak signifikan terhadap landasan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara. Pentingnya peran partai politik dalam pembuatan kebijakan ekonomi tidak hanya mencakup aspek legislasi, tetapi juga melibatkan proses perumusan kebijakan yang bersifat jangka panjang dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Dalam konteks Indonesia, PDI Perjuangan tidak hanya menjadi kekuatan politik yang mendominasi, tetapi juga memainkan peran sentral dalam membentuk visi ekonomi nasional.

Melalui kajian ini, kita akan menyelidiki bagaimana PDI Perjuangan memandang permasalahan ekonomi, strategi yang mereka terapkan dalam merumuskan kebijakan ekonomi, serta dampak konkritnya pada sektor-sektor kunci ekonomi. Studi kasus ini membuka pintu untuk memahami dinamika politik dan ekonomi di Indonesia serta menjelaskan sejauh mana partai politik penguasa dapat membentuk kebijakan ekonomi yang responsif terhadap tantangan global dan lokal. Dengan mengambil fokus pada rentang waktu 2014-2024, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang peran PDI Perjuangan dalam membentuk kebijakan ekonomi nasional, sekaligus mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang dinamika hubungan antara kekuasaan politik dan pembentukan kebijakan ekonomi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penyelidikan ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis

penelitian studi kasus dan bersifat deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif melibatkan penggunaan latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode. Pendekatan kualitatif dianggap penting untuk memahami fenomena sosial dan perspektif individu yang sedang diteliti. Proses penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, yang berasal dari perilaku orang-orang yang diamati. Dalam konteks ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang menurut Suharsimi Arikunto, merupakan pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.

Studi kasus dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian atau analisis terhadap suatu permasalahan yang memiliki ciri-ciri khusus. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif, dan dapat difokuskan pada individu, kelompok, atau bahkan masyarakat secara luas. Stake menambahkan bahwa fokus utama studi kasus adalah untuk memaksimalkan pemahaman terhadap kasus yang sedang dipelajari, bukan untuk mencari generalisasi. Kasus yang diuji dapat bersifat kompleks atau sederhana, dengan durasi studi yang dapat bervariasi tergantung pada tingkat kompleksitas kasus dan waktu yang tersedia untuk penelitian.

Gaya penelitian yang digunakan adalah desain kasus tunggal, di mana penelitian terpusat pada satu unit kasus saja. Dengan kata lain, peneliti memusatkan perhatian pada suatu objek khusus dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber terkait, yang menunjukkan pendekatan holistik dalam pengumpulan informasi. Tujuan utama penelitian bukanlah untuk membuat generalisasi, melainkan untuk menilai keberhasilan suatu tindakan atau perlakuan pada suatu waktu tertentu.

Menurut Sudjana dan Ibrahim, penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan teknik tertentu guna menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Studi kasus yang berkualitas diharapkan dilakukan secara langsung dalam konteks kehidupan nyata dari kasus yang sedang diselidiki. Meskipun data studi kasus

dapat diperoleh langsung dari objek penelitian, namun juga dapat dikumpulkan dari pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kasus tersebut. Bungin menekankan bahwa studi kasus yang menarik adalah yang memberikan kebebasan kepada peneliti untuk mengeksplorasi objek penelitiannya dan menentukan wilayah penelitian yang ingin dikembangkan.

Sifat penelitian ini adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan, yang diperoleh dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ini dapat diartikan sebagai suatu penelitian lapangan yang bertujuan mengungkap gejala suatu objek dengan menggunakan kata-kata, sekaligus untuk mengembangkan atau menjelaskan fenomena tertentu sesuai dengan temuan di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menerapkan metode-metode sebagai berikut:

Metode observasi, Observasi adalah suatu penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Ini dilakukan dengan menggunakan indera, terutama mata, untuk memerhatikan kejadian secara langsung dan dapat diamati pada saat terjadinya. Menurut Nasution, observasi dianggap sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan data berupa fakta mengenai realitas yang diperoleh melalui observasi.

Ryerson mencatat beberapa jenis observasi, antara lain:

- a. Observasi Partisipan
- b. Observasi non partisipan
- c. Observasi dalam setting alami atau buatan
- d. Observasi terstruktur dan tidak terstruktur
- e. Observasi langsung dan tidak langsung

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi non partisipan. Artinya, peneliti tidak secara langsung terlibat dalam kehidupan subjek yang diobservasi. Peneliti berperan sebagai pengamat yang terpisah, melakukan observasi terstruktur. Hal ini dilakukan dengan mengamati aspek-aspek yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Sebelumnya, peneliti telah

menentukan secara umum perilaku apa yang ingin diamati agar masalah yang dipilih dapat diselesaikan.

Wawancara, wawancara memiliki peran penting dalam penelitian kualitatif. Penggunaan wawancara muncul ketika peneliti menemui permasalahan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan ketika peneliti ingin mendalami informasi yang terkait dengan informan. Melalui wawancara atau interview, peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari sumber yang relevan, seperti pendapat, kesan, pengalaman, dan sebagainya. Sudjana mendefinisikan wawancara sebagai proses pengumpulan data atau informasi melalui komunikasi langsung antara penanya dan responden. Di sisi lain, Esterbeg mengidentifikasi beberapa jenis wawancara, termasuk terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Dengan demikian, wawancara dapat dianggap sebagai teknik pengumpulan data yang memanfaatkan interaksi langsung melalui percakapan atau tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, di mana peneliti mengikuti pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman tersebut mencakup garis-garis besar permasalahan yang akan diajukan kepada responden.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai politik sebagai aktor utama

Pada kehidupan politik demokratis, keberadaan partai politik merupakan suatu keharusan yang harus ada pada komponen di negara yang menganut demokrasi. Partai politik berfungsi sebagai pemberi akses kepada setiap orang yang akan berpendapat, sebagai perwakilan rakyat ataupun sebagai sarana kepemimpinan politik yang damai. Partai politik dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir dimana kelompok tersebut dapat mengajukan calon-calon pemimpin untuk dipilih oleh rakyat. Sebagai kelompok yang terorganisir, partai politik tentu mempunyai nilai-nilai dan cita-cita yang sama di setiap anggotanya. Target utama pada partai politik adalah untuk memperoleh sebuah kekuasaan politik dan merebutnya secara sah sesuai pada peraturan konstitusi pada program kelompok

mereka. Dalam menjalankan tugasnya partai politik di tentukan pada tujuan yang ingin mereka capai, sehingga suatu partai politik yang revolusioner akan berjuang sekuat tenaga untuk merubah tatanan pemerintahan, sistem ekonomi maupun suatu budaya di masyarakat. Jika suatu partai politik berhasil maka ia akan mengendalikan setiap sistem yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut.

Partai politik penguasa (PDIP) sebagai aktor utama dalam pembuatan kebijakan ekonomi
Sejarah politik menunjukkan dimana keberlanjutan pemerintahan dan elektabilitas partai pemerintah bergantung pada kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Kebijakan ekonomi pemerintah berkaitan dengan kebijakan politik ekonomi partai yang berkuasa atau partai pemerintah tersebut.

Bukti empiris No. 1 kebijakan politik ekonomi pemerintah berkaitan dengan kebijakan partai politik yang berkuasa. Dibuktikan pada lampiran Risalah Resmi pada tahun 2014 Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013. Fraksi PDI Perjuangan mempunyai pandangan bahwa pemerintah harus meningkatkan kinerja yang sesuai pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tentang APBN yang harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan Undang-Undang efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dan juga memperhatikan aspek keadilan dan kepatuhan.

Bukti empiris No. 2 lampiran Pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPR RI) Atas penyampaian Pemerintah Terhadap Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2024. Fraksi PDIP mempunyai pandangan bahwa yang pertama pemerintah harus menetapkan kebijakan fiskal yang diarahkan kepada arsitektur percepatan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua mengingatkan komitmen pemerintah sejak tahun 2019 selalu menyampaikan bahwa harus ada peningkatan belanja negara yang berkualitas melalui alokasi belanja negara yang prioritas dibanding dengan yang non prioritas.

Maka penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik penguasa dapat memainkan peran dalam mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran untuk berbagai sektor ekonomi seperti contohnya yaitu infrastruktur atau belanja negara. Partai politik penguasa memiliki peran yang penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi karena partai tersebut memiliki power yang lebih dibandingkan partai non penguasaan. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi secara keseluruhan, maka dari itu pentingnya bagi partai politik penguasa dalam menyusun visinya yang jelas dan dapat dikomunikasikan kepada masyarakat dengan baik.

Visi dan misi Partai PDI Perjuangan terkait ekonomi adalah sebagai berikut:

- Visi: Mewujudkan perekonomian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing.

- Misi:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi bangsa dengan memperkuat sektor riil dan memajukan industri nasional.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan guna mendukung pembangunan ekonomi.

3. Mewujudkan keadilan distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah dan sektor.

4. Mendorong pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

5. Menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Partai PDI Perjuangan berupaya mewujudkan visi tersebut melalui kebijakan ekonomi nasional, antara lain:

1. Memperkuat sektor riil dan industri nasional melalui kebijakan perlindungan dan pengembangan industri dalam negeri serta peningkatan daya saing.

2. Mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat.

3. Mengimplementasikan kebijakan redistribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan ekonomi melalui program-program inklusif seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, perlindungan sosial, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui investasi dalam sektor transportasi, energi, dan telekomunikasi.

5. Menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, serta penguatan sistem keuangan yang sehat.

Partai PDI Perjuangan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan ekonomi melalui anggota-anggota partainya yang terlibat dalam lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif. Mereka berperan dalam menyusun dan mengawasi kebijakan ekonomi nasional melalui berbagai mekanisme seperti pembahasan dan pengesahan undang-undang serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.

Evaluasi tingkat partisipasi Partai PDI Perjuangan dalam proses perekonomian Indonesia

PDI Perjuangan telah menjadi salah satu partai politik utama di Indonesia sejak awal reformasi. Partai ini memiliki andil besar dalam proses pembuatan kebijakan ekonomi nasional melalui keterlibatan anggotanya di berbagai lembaga pemerintahan. Keberhasilan PDI Perjuangan dalam menduduki posisi strategis, seperti kementerian ekonomi, menjadi faktor penentu dalam tingkat partisipasinya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi. PDI Perjuangan juga terlibat aktif dalam proses legislasi terkait dengan perekonomian. Keterlibatan ini dapat dilihat dari sejumlah inisiatif undang-undang yang diusulkan atau didukung oleh anggota partai ini. Misalnya, regulasi terkait investasi, perpajakan, dan perlindungan konsumen yang menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi nasional.

Sebagai sebuah partai politik yang berperan sebagai penguasa, Partai PDI

Perjuangan memiliki peran yang signifikan dalam pembuatan kebijakan ekonomi nasional selama periode 2014 hingga 2024. Pada awal pemerintahannya, Partai PDI Perjuangan menetapkan agenda pembangunan ekonomi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional, partai ini memperhatikan aspek-aspek penting seperti distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Partai PDI Perjuangan secara aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan ekonomi nasional dengan menggandeng berbagai stakeholder, termasuk ekonom, akademisi, dan pelaku usaha. Melalui dialog dan konsultasi yang intensif, partai ini berusaha menciptakan kebijakan yang inklusif dan dapat memberikan dampak positif bagi berbagai lapisan masyarakat. Selama masa pemerintahan tersebut,

Partai PDI Perjuangan juga berperan dalam memitigasi tantangan ekonomi, seperti fluktuasi harga komoditas global dan dampak krisis ekonomi global. Partai ini mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan ekonomi sesuai dengan perubahan kondisi eksternal, sambil tetap mempertahankan fokus pada pencapaian target pembangunan ekonomi nasional. Partai PDI Perjuangan juga menunjukkan komitmen terhadap pembangunan sektor riil dengan memberikan dukungan kepada sektor industri, pertanian, dan manufaktur. Dalam hal ini, kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk dalam negeri, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengembangan industri strategis menjadi fokus utama. Selain itu, partai ini aktif dalam menggagas kebijakan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dengan mempromosikan digitalisasi dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Langkah-langkah ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing nasional di era globalisasi. Namun, tentu saja, peran Partai PDI Perjuangan dalam pembuatan kebijakan ekonomi nasional juga mendapat sorotan kritik. Beberapa pihak mengkritik bahwa implementasi kebijakan seringkali menghadapi hambatan administratif dan lambatnya perubahan yang dijanjikan. Selain itu, sejumlah isu seperti korupsi dan kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat juga menjadi sorotan kritis. Dengan demikian, peran Partai

PDI Perjuangan dalam pembuatan kebijakan ekonomi nasional selama periode 2014-2024 mencerminkan upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, namun juga menghadapi tantangan dan kritik yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

4. KESIMPULAN

Dalam periode 2014-2024, Partai PDI Perjuangan memiliki peran yang signifikan dalam pembuatan kebijakan ekonomi nasional di Indonesia. Partai politik sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah dan implementasi kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui studi kasus pada Partai PDI Perjuangan selama sepuluh tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa peran partai politik penguasa sangat memengaruhi berbagai aspek kebijakan ekonomi nasional.

Partai PDI Perjuangan berperan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan ekonomi melalui keterlibatan anggota partai di lembaga legislatif dan eksekutif. Para anggota partai yang menduduki posisi kunci dalam pemerintahan memiliki pengaruh besar dalam proses perumusan kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi. Selain itu, partai ini juga terlibat dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan di tingkat partai untuk mencapai konsensus terkait kebijakan ekonomi yang akan dijalankan.

Partai PDI Perjuangan memainkan peran dalam mengawasi implementasi kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan. Dengan memiliki perwakilan di berbagai lembaga pemerintah, partai ini dapat memastikan bahwa kebijakan yang telah disepakati dijalankan sesuai dengan visi dan misi partai tersebut. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap dampak kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan ekonomi nasional, dan distribusi kekayaan. Selain itu, peran partai politik penguasa seperti PDI Perjuangan juga tercermin dalam upaya mereka untuk membangun kemitraan dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan dan kritik terhadap peran partai politik dalam pembuatan kebijakan ekonomi juga perlu diperhatikan. Dalam beberapa kasus, partai politik mungkin terjerat dalam kepentingan politik yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan keberlanjutan kebijakan ekonomi. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan juga bergantung pada faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan faktor-faktor internal seperti tata kelola pemerintahan. Secara keseluruhan, peran Partai PDI Perjuangan dalam pembuatan kebijakan ekonomi nasional selama periode 2014-2024 mencakup aspek perumusan, implementasi, dan pengawasan. Keberhasilan mereka dalam mengelola kebijakan ekonomi akan menjadi penentu penting bagi arah pertumbuhan ekonomi Indonesia serta kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ellya Rosanna. 2012. PARTAI POLITIK DAN PEMBANGUNAN POLITIK. Vol. 8 No. 7
- MUHAMMAD YAHYA ARWIYAH. 2012. Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. Vol. XXVIII. No. 1
- Putra, I. G. A., & Handayani, L. W. (2020). "Dinamika Partai Politik di Indonesia: Analisis Tingkat Partisipasi PDI Perjuangan dalam Pembentukan Kebijakan Ekonomi." *Jurnal Kajian Politik*, 5(1), 45-60.
- Riant Nugroho. (2018). "Partisipasi Partai Politik dalam Kebijakan Ekonomi: Studi Kasus PDI Perjuangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 123-145.
- Widodo, A., & Rahayu, S. (2019). "Peran Partai Politik dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Kasus PDI Perjuangan." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 7(3), 189-204.